



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**OPTIMALISASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK)
GUNA MENINGKATKAN KUALITAS DOKUMEN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
MELALUI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**NAMA: KOMANG SIDHI ARSANA WIGUNA
NIP. : 19860731 201012 1 001
N D H : 09**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri merupakan inisiatif strategis dalam upaya melaksanakan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 yaitu dalam rangka memantapkan implementasi penganggaran berbasis kinerja khususnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dimana produk ini akan mengekspose integrasi tahapan secara utuh dan target waktu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta keterkaitannya dengan tata kelola kinerja organisasi.

Komitmen bersama yang dibangun dengan Tim Efektif dan para pemangku kepentingan dalam upaya membangun tahapan-tahapan jangka pendek sebagai langkah awal dan pondasi utama mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi kinerja. Kajian-kajian terkait konsepsi harmonisasi/keselarasan antara strategi, perencanaan, kinerja, dan anggaran yang substansial dihasilkan melalui forum-forum komunikasi yang berkesinambungan. Sehingga pada akhir tahapan jangka pendek telah dihasilkan Draft Pedoman Operasional (*Better Operational Guide/BOG*) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Draft Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam penerapannya bukan tanpa kendala, mengingat bahwa perubahan akan berimplikasi dengan terganggunya kegiatan rutin atau *comfort zone*. Namun dengan *treatment* melalui komunikasi yang selektif dan efektif dapat menanggulangi kendala baik dari aspek waktu, personil maupun anggaran.

Dengan demikian melalui proyek perubahan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan panduan implementasi proses bisnis perencanaan dan penganggaran terintegrasi dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja serta tercipta keselarasan strategi, perencanaan, kinerja, dan anggaran yang bermuara pada tata kelola keuangan yang kredibel dan akuntabel dalam mendukung visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.